

**FUNGSI WALI NAGARI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
RAKYAT NAGARI DALAM MENETAPKAN PERATURAN NAGARI  
LUBUAK JANTAN PERIODE 2019-2023 DI KECAMATAN LINTAU BUO  
UTARA KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Syarat***

***Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**DISUSUN OLEH:**

**PRIYA PUTRI DEWINDA**

**2010012111207**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**No. Reg: 26/Skripsi/HTN/FH/II-2024**

Nama : Priya Putri Dewinda  
NPM : 2010012111207  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Fungsi Wali Nagari Dan Badan  
Permusyawaratan Rakyat Nagari Dalam  
Menetapkan Peraturan Nagari Lubuak Jantan  
Periode 2019-2023 Di Kecamatan Lintau Buo  
Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi  
Sumatera Barat

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

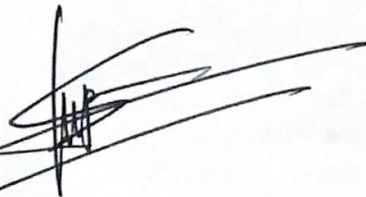
Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H (Pembimbing)  (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



  
(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**FUNGSI WALI NAGARI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
RAKYAT NAGARI DALAM MENETAPKAN PERATURAN NAGARI  
LUBUAK JANTAN PERIODE 2019-2023 DI KECAMATAN LINTAU BUO  
UTARA KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Priya Putri Dewinda<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

Email: [priyaputri160@gmail.com](mailto:priyaputri160@gmail.com)

**ABSTRAC**

*To organize and take care of the interests of the Nagari community, the Nagari Government was formed. According to Article 1 Point 6 of the Regional Regulation of Tanah Datar Regency Number 4 of 2008. Nagari Regulations are made based on the circumstances and development of the Nagari community. Nagari regulations made cover all aspects of community life, including people who throw garbage into the river while the river has become a prohibited hole which is certainly very well guarded, besides that there are community diseases such as fights between students, online gambling, drug use. The formulation of the problem of this research: 1) The Function of the Nagari Wali and BPRN in Establishing Nagari Regulations? 2) What are the obstacles faced in establishing nagari regulations? 3) What efforts are made in establishing nagari regulations? This research is a sociological juridical research. The data collected are primary and secondary data, data collection techniques with document studies and interviews. Then analyzed with qualitative analysis. The results of the study: 1) The function of the Nagari Wali and BPRN is fully functional in establishing village regulations and has not been implemented properly and optimally. 2) The obstacles faced in carrying out the function of establishing regulations are the lack of coordination between the parties involved, the differences in views and culture of the community, and the lack of participation of the Nagari Apparatus. 3) Efforts made to improve coordination between related parties, conduct socialization to village officials, increase participation in drafting regulations, provide guidance to village officials.*

***Keywords: Function, Nagari Wali and BPRN, Nagari Regulation***

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari dibentuklah Pemerintahan Nagari. Menurut Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari, menyatakan Pemerintah

Nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari berdasarkan asal usul Nagari di Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Nagari yang dibuat berdasarkan keadaan dan perkembangan masyarakat nagari. Peraturan Nagari yang dibuat mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun, masih ada aspek yang tidak diatur oleh peraturan Nagari sedangkan hal tersebut merupakan wewenang Wali Nagari untuk menetapkan peraturannya, diantaranya terdapat masyarakat yang membuang sampah ke sungai selain itu terdapat kebiasaan buruk atau penyakit masyarakat seperti perkelahian antar pelajar, perjudian online mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa, pemakaian narkoba. Hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang sebaiknya diatur oleh Peraturan Nagari.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul: **“FUNGSI WALI NAGARI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI DALAM MENETAPKAN PERATURAN NAGARI LUBUAK JANTAN PERIODE 2019-2023 DI KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari Lubuak Jantan Periode 2019-2023 di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari

dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari Lubuak Jantan Periode 2019-2023 di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat?

3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Lubuak Jantan dalam Menetapkan Peraturan Nagari Lubuak Jantan Periode 2019-2023 di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa Fungsi Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari Lubuak Jantan Periode 2019-2023 di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari Lubuak Jantan Periode 2019-2023 di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Lubuak Jantan dalam Menetapkan Peraturan Nagari Lubuak Jantan Periode 2019-2023 di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah

Datar Provinsi Sumatera Barat.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis

#### 2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara

#### 4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan Analisa Kualitatif

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Fungsi Wali Nagari Dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Dalam Menetapkan Peraturan Nagari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mukhlis bahwa dalam membuat peraturan belum terlaksana secara baik dan optimal dikarenakan tidak ada peraturan nagari yang terkait dengan masyarakat secara langsung, peraturan nagari yang ada hanya peraturan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari.

### B. Kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan

### Rakyat Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari.

1. Kurangnya koordinasi antara para pihak-pihak yang terkait,

2. Adanya perbedaan pandangan dan kultur masyarakat

3. Kurangnya partisipasi Perangkat Nagari, kualitas sumber daya aparatur pemerintah nagari.

### C. Upaya-upaya apa yang dilakukan Wali Nagari Dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari.

1. Meningkatkan koordinasi antara masyarakat dan Perangkat Nagari

2. Mensosialisasikan kepada masyarakat dalam membuat Peraturan Nagari.

3. Meningkatkan Partisipasi Perangkat Nagari dalam penyusunan peraturan.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Fungsi Wali Nagari Dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Dalam Menetapkan Peraturan Nagari belum terlaksana secara baik dan optimal dikarenakan tidak ada peraturan nagari yang terkait dengan masyarakat secara langsung.

2. Kendala-kendala yang dihadapi menjalankan fungsi menetapkan peraturan nagari di nagari Lubuak Jantan adalah kurangnya

koordinasi antara para pihak-pihak yang terkait, adanya perbedaan pandangan dan kultur masyarakat, dan kurangnya partisipasi Perangkat Nagari,

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menetapkan peraturan nagari melakukan dengan meningkatkan koordinasi antara masyarakat dan perangkat nagari, mensosialisasikan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi perangkat nagari dalam penyusunan peraturan nagari, memberikan pembinaan kepada perangkat nagari.

#### **B. SARAN**

1. Agar dapat mensosialisasikan tentang pembuatan peraturan nagari kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembuatan peraturan nagari.
2. Agar perangkat nagari yang terkait dalam pembuatan peraturan nagari diharapkan dapat menerima aspirasi perangkat nagari dalam pembuatan peraturan nagari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku-Buku**

- Muhammad Azan, 2016, *Peran badan musyawarah nagari (BAMUS)*, PT. Garuda Garba Rujukan Digital, Jakarta
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari

#### **C. Sumber lain**

<https://123dok.com/article/efektifitas-fungsi-badan-permusyawaratan-rakyat-nagari-bprn.q2n1ed8p> diakses pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 17:11 WIB.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Dosen Pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H
3. Penasehat Akademik, Ibu Syafridartati S.H., M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

